



# RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI**  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI  
TAHUN 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dan melindungi Anak dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan peran seluruh masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan keamanan, keadilan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat, seiring dengan lajunya isu globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial dan pelayanan lainnya di barengi peningkatan pemberdayaan dan profesionalitas yang dibutuhkan seiring dengan hak-haknya masyarakat selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negatif dari persoalan sosial akibat dampak pembangunan semakin meningkat.

Adanya kasus-kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan yang justru sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dikarenakan kurangnya pengamalan agama didalam rumah tangga serta perkembangan teknologi yang tidak terkendali, dimana anak-anak memiliki akses langsung dari kemajuan teknologi tersebut, permasalahan tersebut merupakan bukti telah terjadinya perampasan (deprivation) hak-hak azazi perempuan dan anak secara sewenang-wenang, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu selalu ditingkatkan.

Penyusunan Renja DPMPPA Kota Jambi Tahun 2022 disesuaikan dengan RKPD Kota Jambi 2018-2023 pada Tahun 2021, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, tertuang dalam *RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022* di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai acuan dalam rangka capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (K3)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419),
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Kelurahan.
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Adat.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
25. Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 43).
26. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.
27. Perda No 7 tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Jambi 2018-2023

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah untuk menentukan indikatif besarnya APBD kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

## 2. TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang dalam rangka fasilitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja DPMPPA Kota Jambi sampai dengan tahun 2022.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini dituangkan kedalam 4 (empat) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Lampiran Tabel : T-C.29)
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah(Lampiran Tabel: T-C.30)
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (lampiran Tabel T-C.31)
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2022 (Lampiran Tabel: T-C.33)
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V.PENUTUP
- LAMPIRAN

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2020 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2021 dalam Renja PD pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 10.922.004.616,-. Pada tahun 2020 DAN Tahun 2021 merupakan tahun Virus corona yang mewabah dan menjadi pandemi dunia di awal tahun 2021 tidak terkecuali di Kota Jambi banyak mempengaruhi sendi kehidupan warga masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan perangkat daerah tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan SKB 3 Menteri Kota Jambi melakukan refocussing sebesar Rp 930.710.829,- untuk penanganan covid-19 dan bantuan sosial. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 maka dapat dilihat capaian hasil dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk program kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi antara lain adalah :

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk Program Kegiatan yang dicapai Tahun 2021 terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan, dimana realisasi yang telah memenuhi target kinerja pada tahun 2021 adalah :

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	21.679.001	100	0	0



2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan	3.644.845.175	100	6,62	6,62
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104.400.000	100	0	0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Umum	270.576.615	100	3,24	3,24
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	145.671.900	100	0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	323.448.400	100	17,23	17,23
7.	Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	501.303.269	100	18,23	18,23
8.	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PUG dan PPRG	199.400.000	100	0	0
9.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	485.855.185	100	0,98	0,98
10.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana, Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dalam Ketenaga Kerjaan	127.297.400	100	0	0
11.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	357.559.061	100	34,07	34,07
12.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak	143.352.090	100	0	0
13.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	25.599.500	100	0	0

	Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
14.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	282.101.733	100	6,32	6,32
15.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase Anak ikut dalam organisasi forum anak daerah (FAD)	211.398.083	100	4,91	4,91
16.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	93.885.031	100	4,91	4,91
17.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM, dan Konvensi Hak anak	109.716.110	100	0	0
18.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	461.961.512	100	1,03	1,03
19.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Peningkatan Dasawisma	3.411.703.751	100	2,95	2,95
<b>Total</b>			10.922.004.616			

Dari capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun per Maret 2021 dari seluruh kegiatan baru mencapai 5,76 %.

Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra DPMPPA pada umumnya sudah tercapai namun masih diperlukan upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan dan menjamin kesinambungan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :

1. Adanya upaya monitoring dan Evaluasi hasil yang lebih efektif

2. Membentuk Tim percepatan capaian program dan kegiatan
3. Membentuk pilot Projek di wilayah RT dan Kelurahan baik kampung bantar, Ramah Anak, P2WKSS dll.

Lebih lengkapnya hasil evaluasi terdapat dalam lampiran TC-29

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan pada Urusan Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas dan untuk mencapai target dimaksud maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mendapatkan Anggaran Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada uraian dibawah ini yaitu :

Capaian kegiatan sampai dengan Per Maret 2021 sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan	4.499.792	100	0	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya RKA- SKPD	2.697.800	100	0	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	2.999.895	100	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	2.499.884	100	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	2.999.735	100	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Tersedinya Buku Laporan Capaian Laporan Kinerja SKPD	2.999.997	100	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.999.898	100	0	0
<b>Total</b>			<b>21.679.001</b>			

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertib Administrasi Keuangan	3.245.451.233	100	0	0
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertib Administrasi Keuangan	389.394.359	100	6,62	6,62
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertib Administrasi Keuangan	4.999.830	100	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tertib Administrasi Keuangan	4.999.753	100	0	0
Total			3.644.845.175			

## 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Praturan Perundang-undangan	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	40.000.000	100	0	0
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	64.400.000	100	0	0
Total			104.400.000	100	0	0

## 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7

1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	12.001.000	100	0	0
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	115.750.020	100	3,24	3,24
3.	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	18.217.595	100	0	0
4	Fasilitas kunjungan Tamu	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	20.400.000	100	0	0
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	104.208.000	100	0	0
Total			270.576.615	100	0	0

## 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan Mebel	Tertib Pengadaan Administrasi Umum	105.694.600	100	0	0
2.	Pengadaan Peralatan dan mesin	Tertib Pengadaan Administrasi Umum	39.977.300	100	0	0
Total			145.671.900	100	0	0

## 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58.448.400	100	7,69	7,69
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	265.000.000	100	9,54	9,54
Total			323.448.400	100	9,54	9,54

## 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tertib pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.884.120.	100	7,48	7,48
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertib pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.675.949	100	10,75	10,75
3.	Pemeliharaan Mebel	Tertib pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	100	0	0
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertib pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.980.000	100	0	0
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertib pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.763.200	100	0	0
Total			501.303.269	100	0	0

## 8. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan

### a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah Memiliki Focal Poin PUG dan PPRG	199.400.000	100	0	0
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	485.855.185	100	0,98	0,98
Total			685.255.185	100	0,98	0,98

## 9. Program Perlindungan Perempuan

### a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga ,Perlindungan Hak Perempuan dari	127.297.400	100	0	0
2.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	279.570.681	100	11,01	11,01
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	77.988.380	100	3,72	3,72
Total			485.107.261	100	3,72	3,72

**10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga****a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mewujudkan Kesehatan Gender dan Anak	143.352.090	100	1,11	1,11
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyediaan Layanan Kualitas Keluarga	25.599.500			
Total			168.951.590	100	0	0

**11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender****a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	164.450.730	100	2,73	2,73
2.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	117.651.003	100	3,59	3,59
Total			282.101.733			

**12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)****a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha**



No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	Persentase Anak ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	87.930.756	100	3,62	3,62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	123.467.327	100	1,29	1,29
Total			211.398.083			

**b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Pelayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	85.684.972	100	3,71	3,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	8.200.059	100	0	0
Total			93.885.031			

**a. Program Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Anak	Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM, dan Konvensi Hak Anak	109.716110	100	1,20	1,20

**13. Program Perlindungan Anak****a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang di tindaklanjuti	461.961.512	100	1,03	1,03

**14. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.****a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Targ et %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1.199.999.684	100	3,93	3,93
2.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100.890.348	100	3,59	3,59
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	488.086.070	100	2,45	2,45

4.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1.118.224.340	100	2,07	2,07
5.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	81.116.085	100	3,58	3,58
6.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	63.387.421	100	2,07	2,07
7.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	289.999.803	100	0	0
Total			3.411.703.751			

## 2. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Tersedianya baju dinas	64.000.000	100	0	0
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya peningkatan wawasan aparatur	40.000.000	100	0	0
3.	Perjalanan Dinas	Sekretariat DPMPPA, Bidang PH dan PA, Bid. PK & PPM, Bid. Pemb dan PP, Bid. PUEM dan TTG	430.867.964	100	5,78	5,78

**4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Termotivasinya kelurahan dan lokasi binaan	685.255.185	100	0	0
2.	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penurunan kekerasan terhadap anak	305.283.114	100	12,07	12,07
3.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Penurunan kasus KDRT terhadap anak dan perempuan	109.716.110	100	0	0
4.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terwujudnya pembinaan kesatuan gerak PKK, dasawisma, 10 pokok program PKK, LBS, PHBS, UP2K, kinerja PKK dan kader P2WKSS	1.199.999.684	100	0	0

**5. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Alokasi Dana	Target %	Realisasi	
					Fisik %	Keu %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	Terwujudnya penataan kampung bersih aman dan pintar	1.188.224.340	100	0	0
2.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terwujudnya kegiatan gotong royong bersama masyarakat se kota jambi	289.999.803	100	0	0
3.	Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	- Terlestarikannya adat daerah jambi dan pembinaan adat tk.kec.dan kel.pilihan pemenang lomba kelurahan tk. kota jambi. - Terbinanya	488.086.070	100	0	0

		kelembagaan LPM, dan Ketua RT - Termotivasinya kelurahan dan lokasi binaan di kota jambi.				
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG	Tersedianya jumlah posyantek aktif dan kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif dan inventarisasi kelurahan	81.116.085	100	0	0

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada Daftar Lampiran I :  
Tabel T-C.29.

Dari hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan Rekapitulasi Capaian program dan kegiatan dari Realisasi Alokasi Anggaran Fisik dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu :

Tabel T-C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 <sup>22</sup> 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		2022	2019	2020	2020		2021		
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Surat Masuk dan Surat Keluar		10 Orang						
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Terwujudnya Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Tel-		3 Tahun						

					epon, Listrik Internet dan Air								
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Penyediaan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua		66 Unit					
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD		3 Tahun					
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Tenaga Kebersihan Kantor		3 Orang					
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		11 Orang					
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		4 Tahun					

			1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Suku Cadang Peralatan Listrik		3 Tahun						
			1 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai		1 Tahun						
			1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Kegiatan Rapat		3 Tahun						
			2 0	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti & Penjaga malam	Terwujudnya Tenaga Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam		10 Orang						
			2 1	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		3 Tahun						
2 2	0 1	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									
			0 3	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan		3 Tahun						



					Prasarana yang Memadai									
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai		1 Tahun							
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai		36 Unit							
			11	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terpenuhinya Peralatan Kantor yang Memadai		3 Tahun							
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan dinas Operasional yang Memadai		65 Unit							
			26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		100 Kali							
			30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja		102 Unit							
			42	Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3 Tahun							

2	0	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>									
2	1		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas		248 Stel						
2	0	05		<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>									
2	1		0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur		8 Orang						
2	0	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>									
2	1		0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Tahun						
2	0	08		<b>PROGRAM PERENCANAAN SKPD</b>									
2	1		0	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terwujudnya Penyusunan Buku Renstra dan KUA PPAS		20 Buku						
			0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya Penyusunan Buku Renja dan		20 Buku						

						KUA PPAS										
2	0	0				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%					100%			
2	0	0	02.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB					72.53 B			
2	0	0	02.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2	0	0	02.	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi	5 Dokumen					5 Dokumen			
2	0	0				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%					100%			
2	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%					100%			





						san Pemerintah Daerah									
2	08	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Item						10 Item		
2	08	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
2	08	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	1794 surat						1794 Surat		
						Jumlah Tenaga TKK	3 Orang					3 Orang			
2	08	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (Air)	154000 M3						154000 M3		
						Jumlah Jasa Komunikasi (Internet)	4200 Mbps					4200 Mbps			
						Jumlah Jasa Komunikasi (Listrik)	87630 KWH					87630 KWH			



						Jumlah Rehabilitas Ringan/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit					5 unit		
2	08	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan Peralatan Kerja	40 unit					42 unit		
					Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	-					16 Unit		
2	02	01	09		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>									
				01	Pengembangan Data/Informasi	1. Terpilihnya Pemenang Lomba Kelurahan Tk. Kota 2. Tercetaknya Buku Profil Kelurahan 3. Tersedianya Data Profil Kelurahan Secara Online		3 tahun						



2	0	20	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEREMPUAN DAN PA</b>								
2	1		0	Fasilitas Pengembangan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender.	Penurunan kasus KDRT, Meningkatnya Pengetahuan tentang Pengarusutamaan gender dan anak		1 tahun				
			0	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan dan Terlaksananya Pelatihan untuk Kelompok Usaha Perempuan		1 tahun				
			0	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Termotivasinya Kelurahan dan Lokasi Binaan		186 kelurahan				
			0	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak, Terbentuknya Kelurahan Layak Anak, dan Terbentuknya		1 tahun				

					Kota Layak Anak								
			06	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	<p>1. Melayani dan Menyelesaikan Kasus-Kasus pada Kekerasan Anak dan Perempuan</p> <p>2. Memberi Sosialisasi Terhadap Korban</p> <p>3. Terwujudnya Penurunan Kekerasan KDRT terhadap Anak dan Perempuan</p>		1 tahun						
			07	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<p>1. Terlaksananya 10 Program Pokok PKK</p> <p>2. Terlaksananya Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB, LBS, PHBS, Kader Posyandu, UP2K, Kinerja PKK, Kader P2WKSS.</p>		186 kelurahan						



2	08	03	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	8 Kali						6 Kali		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Selama Satu Tahun	5 kali						5 kali		
						Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	5 Kegiatan					5 Kegiatan			
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabu-	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	100%						100%		

					paaten/Kota									
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	46 Kasus						45 Kasus	
2	08	03	02.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Selama Satu Tahun	0						20 Kali	
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	35%						30%	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak	79%						78,81%	

2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Dasawisma	11 Kecamatan 62 Kelurahan					11 Kecamatan 62 Kelurahan		
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	3,00%					2,90%		
2	08	04	02.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUSPA)	16%					16%		
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER</b>	Cakupan Data Gender dan Anak	25%					20%		

2	08	05	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	25%						20%		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kab/Kota (Rencana Aksi Daerah (RAD) Anak dan Gender, Gender Budget Sistim (GBS) Gender Analysis Pathway (GAP) dan Data Data Kesetaraan Profil Gender dan Anak)	3 Dokumen						2 Dokumen		
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Data yang Disajikan dan Dimanfaatkan dalam Kelembagaan Data	3 Dokumen						2 Dokumen		

2	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
2	0	0	2.0		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%					80%		
	8	6	1			Jumlah Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	230 Anak					200 Anak		
2	0	0	2.0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha/Media yang Tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak	5 kali					5 kali		
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak 1 Tahun	7 Kali					7 Kali		



2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	9 kali						9 kali		
	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 Tahun	7 Kali						7 Kali		
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 1 Tahun	2 kali						2 kali		
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak</b>	0,0207						0,0217		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	11 Kali						11 Kali		

2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	6 kali						6 kali		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Selama Setahun	5 kali						5 kali		
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	100%						100%		
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	46 Kasus						45 Kasus		

2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Selama 1 Tahun	21 Kali					20 Kali		
	22	01	20		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									
				01	Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	Tersedianya Kampung Bersih Aman dan Pintar		186 kelurahan						
				02	Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat	Terwujudnya Keterampilan bagi Masyarakat dalam Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemberian Paket Bantuan		100%						
				05	Pemberdayaan fasilitas sarana dan prasarana kelurahan (Musrenbang dan Posyantek)	1. Terselenggaranya Koordinasi dan Interaksi Sarana dan Prasarana Kelurahan		62 kelurahan						



						dan Ketua RT									
						4. Terselenggaranya Penataan Lingkungan Paska di Lokasi P2W-KSS									
						5. Aktifnya Kelompok Dasa Wisma									
				07	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Tersedianya Forum KPM di Kota Jambi									
						2. Terlestarkannya Adat Tk. Kec dan Tk. Kelurahan Piliannya Pemenang		100%							
						3. Terbinanya Kelembagaan LPM, Posyandu dan Ketua RT di Kelurahan									
				04	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya Gotong Royong bersama Masyarakat Sekota Jambi		62 Kelurahan							





					Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Kegiatan					2 Kegiatan		
2	13	5	02.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Kerjasama yang menjalin kemitraan	2 Dokumen					1 Dokumen		
2	13	5	02.01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat	Persentase Kader Kelembagaan yang Aktif	32%					32%		



## 1) ALOKASI DAN REALISASI BELANJA

Dalam Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian Alokasi dan Realisasi untuk Belanja Langsung yang termuat dalam Belanja Pegawai dapat dilihat pada Tabel. 1 berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Alokasi dan Realisasi Capaian**  
**ANGGARAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran Per Maret 2021**

Kode Rekening	Uraian	TA 2021		
		Anggaran	Realisasi (Rp.)	%
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.762.081.116</b>		
5.1.01	Belanja Pegawai	<b>3,458.571.116</b>	<b>0</b>	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.176.909.883	246.646.704	22,74
5.1.05	Belanja Hibah	126.000.000	0	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>159.923.500</b>	<b>0</b>	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Me- sin	159.923.500	0	
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>10.922.004.616</b>	<b>246.646.704</b>	<b>22,74</b>

### 15.ALOKASI DAN REALISASI BELANJA OPERASI

Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung dengan beberapa Program Kegiatan yang termuat ke dalam Belanja Pelayanan Umum yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA OPERASI**  
**Belanja Pegawai**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Jambi Tahun Anggaran Per Maret 2021**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Dana	Realisasi Capaian Dana	Target %	Realisasi %
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.011.924.360	92.300.436	100	7,55
2.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	342.752.090	4.770.000	100	0,70
3.	Program Perlindungan Perempuan	485.107.261	0	100	-
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	168.951.590	1.590.000	100	0,94
5	Program Perlindungan Khusus Anak	571.677.622	6.085.000	100	1,12
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.283.114	7.950.000	100	2,87
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	282.101.733	8.715.000	100	3,16
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.411.703.751 212.931.704	91.521.268	100	2,95
	<b>TOTAL JUMLAH OPERASI</b>	<b>10.922.004.616</b>	<b>212.931704</b>	<b>100</b>	<b>3,90</b>

Hasil Rekapitulasi Capaian APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini yaitu :

**Tabel. 3**  
**Alokasi dan Realisasi Capaian APBD**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	URAIAN	Alokasi Dana	Realisasi Capaian Dana	Target %	Realisasi %
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.762.081.116</b>			
	Belanja Pegawai	<b>3,458.571.116</b>	<b>0</b>		
	Belanja Barang dan Jasa	7.176.909.883	246.646.704	100	22,74
	Belanja Hibah	126.000.000	0		
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>159.923.500</b>	<b>0</b>		
	Belanja Modal Peralatan Mesin	159.923.500	0		
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>10.922.004.616</b>	<b>246.646.704</b>	100	<b>22,74</b>

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPP

### 2.2.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu:

- a. < 55 % kategori kurang berhasil
- b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil
- c. 71 % - 85 % kategori berhasil
- d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil

(2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari:

- a. Indikator input (masukan) adalah sumber daya manusia, Dana, Alat/kendaraan serta metoda dan kebijakan-kebijakan
- b. Indikator output (keluaran) adalah Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat
- c. Indikator outcome (hasil) adalah Meningkatkan kesejahteraan, keberdayaan bagi masyarakat, perempuan dan anak
- d. Indikator benefit (manfaat) adalah situasi aman, damai dan sejahtera bagi kota jambi

(3). Dasar pembobotan

Misi-misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauhmana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Penetapan bobot antar indikator, antar kegiatan, antar program dan antar kebijakan sebagai berikut:

- a. Indikator yang menunjukkan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menunjukkan input dan output.
- b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.
- c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi.
- d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.

Sementara ini untuk Indikator benefit dan impact belum diukur hanya baru pada Indikator kinerja outcome.

### 2.2.2 INDIKATOR KINERJA

Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi.

Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Nilai capaian masing-masing indikator ini selanjutnya di evaluasi dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Kegiatan tersebut dievaluasi sampai dengan Per Desember 2020.

### 2.2.3 TARGET KINERJA

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2020 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing - masing kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2020, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan. Target kinerja untuk masing-masing sasaran strategik yang hendak dicapai dalam Tahun 2021.

Target Kinerja sampai dengan Per Mei 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4**

**TARGET KINERJA TAHUN Per Maret 2021  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Jambi**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.	1. Terwujudnya surat masuk dan surat keluar 2. Tersedianya air, telepon, listrik, internet 3. Tersedianya jasa administrasi keuangan 4. Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan perkantoran 5. Tersedianya alat tulis dan barang cetakan	9 kegiatan	2.422.223.486,00. -

		6. Terpenuhiya makanan dan minuman 7. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8. Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 9. Terpenuhiya pembangunan dan perlengkapan gedung kantor		
2.	Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur.	2.2.3.1 Tersedianya pakaian dinas 2.2.3.2 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 2.2.3.3 Tersedianya perjalanan dinas untuk secretariat dan bidang lainnya	3 kegiatan	525.867.964,00.-
3.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Terlaksananya penyusunan: - Rencana Strategis SKPD - Rencana Kerja SKPD 3. Terlaksananya pengembangan data/informasi.	3 kegiatan	70.880.000,00
4.	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Terlaksananya penguatan kelembagaan PUG dan anak	1. Termotivasinya kelurahan dan lokasi binaan 2. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak 3. Penurunan kasus KDRT terhadap anak dan perempuan. 4. Terwujudnya Pembinaan Kesatuan Gerak PKK, KB, Kesehatan, Dasawisma, 10 Pokok Program PKK, LBS, PHBS, UP2K, Kinerja PKK dan Kader P2WKSS.	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1.032.570.000,00 571.677. 357.809.861 1.199.999.684
5.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat	1. Terwujudnya Penataan Kampung Bersih Aman dan Pintar (Bantar). 2. Terlaksananya pengembangan keterampilan bagi masyarakat, TTG dan inventarisasi kelurahan 3. Tersedianya forum KPM di Kota Jambi, Terlestarikannya adat daerah jambi dan pembinaan adat tk.kec dan kel pilihan pemenang lomba kel tk. Kota jambi. Terbinanya kelembagaan LPM, dan Ketua RT di kel. Serta Termotivasinya kel dan lokasi binaan di kota jambi. 4. Terwujudnya kegiatan gotong royong bersama masy sekota jambi.	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1.188.224.430,00 63.387.421 488.086.070 289.999.803
		JUMLAH	23 kegiatan	9.167.000.000,00.-

**Tabel 5**  
**NILAI CAPAIAN KINERJA TAHUN Per Maret 2021**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Jambi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah Target	Realisasi Capaian	%
1.	Meningkatkan kinerja aparatur	1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1. Terwujudnya surat masuk dan surat keluar	17.716.000	0	0
		2. Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik.	2. Terwujudnya penyediaan Air, Listrik, Telepon dan Internet.	272.155.200	38.276.921	14,06
		3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	3. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan program kegiatan.	297.360.700	34.006.700	11,44
		4. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	4. Terpenuhinya pelaksanaan Kegiatan perkantoran	1.268.698.400	105.306.000	8,30
		5. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor cetak dan penggandaan	2.2.3.4 Tersedia nya alat tulis kantor, dan barang ce-takan	45.000.000	0	0
		6. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.	6. Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman.	30.000.000	0	0
		7. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	7. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	168.172.826	14.269.770	8,49
		8. Terwujudnya kendaraan dinas layak operasional	8. Terlaksananya peningkatan sarpras	272.620.360	17.880.000	6,56
		9. Tepenuhinya fasilitas gedung kantor yang nyaman	9. Terpenuhinya pembangunan dan per-lengkapan ge-dung kantor.	50.500.000	49.900.000	98,81
2.	Meningkatnya	Tersedianya pakaian	Terlaksananya	60.000.000	0	0

	disiplin aparatur sipil harian	Disiplin Aparatur				
3.	Meningkatnya kinerja aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal aparatur.	35.000.000	0	0
4.	Meningkatnya kinerja aparatur	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	430.867.964	24.893.240	5,78
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	10.000.000	9.999.000	99,99
6.	Meningkatnya besaran kebutuhan Renstra, Renja, LPPD, Lap. Tahunan	Tersedianya dan terlaksananya pembuatan Renstra dan buku Renja, LPPD dan Laporan Tahunan	Tersedianya dan terlaksananya pembuatan Renstra dan buku Renja, LPPD dan Laporan Tahunan	6.000.000	0	0
7.	Meningkatnya pengembangan Data/Informasi	- Terlaksananya lomba kelurahan tk. Kota Jambi - Penyusunan buku profil kelurahan	- Terpilihnya pemenang lomba kelurahan Tk. Kota Jambi - Tercetaknya buku profil kelurahan secara online - Terlaksanya profil adat istiadat Kota Jambi. - Tersedianya buku profil kel secara ONLINE Data dasar keluarga.	54.880.000	0	0
8.	Tertatanya Lokasi Binaan	Terlaksananya : - pemberdayaan pr	Termotivasinya kelurahan dan	1.032.570.000	0	0



	Yang Bersih dan sehat.	dan kesetaraan gender - perlindungan perempuan, data kekerasan perempuan - Terselenggaranya penataan lingkungan pasca dilokasi P2WKSS dan Organisasi Perempuan	lokasi binaan			
9.	Terwujudnya peringatan hari anak, data kekerasan anak semakin berkurang dan terciptanya kota layak anak	Terlaksananya peningkatan fasilitas pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pengembangan organisasi anak	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	522.000.000	63.025.000	12,07
10.	Terlaksananya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terwujudnya penurunan kekerasan KDRT terhadap anak dan perempuan se- kota jambi	Melayani dan menyelesaikan kasus-kasus pada kekerasan anak dan perempuan dan memberi sosialisai terhadap korban	125.000.000	0	0
11.	Meningkatnya Motivasi Kelompok Dasa Wisma	Terwujudnya 10 program pokok PKK	Terwujudnya pembinaan kesatuan gerak PKK, KB, Kesehatan, dasawisma, 10 Program Pokok PKK, LBS, PHBS, Kader Posyandu, UP2K, Kinerja PKK dan Kader P2WKSS.	1.993.858.550	0	0
12.	Terlaksananya pengembangan Kampung	Terlaksananya program pemberdayaan	Terwujudnya penataan kampung	1.787.000.000	0	0

	Bantar.	masyarakat	Bantar.			
13.	Terwujudnya gotong royong bersama	Terlaksananya gotong royong bersama dalam kegiatan.	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM	120.050.000	0	0
14.	Meningkatnya SDM di Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya organisasi kelembagaan di 62 kel. Luasnya pengenalan adat melayu jambi kemasyarakatan	Tersedianya Tenaga penggerak Pembangunan Meningkatnya pengetahuan adat melayu bagi masyarakat Terlaksananya pembinaan kelembagaan LPM, dan Ketua RT	Tersedianya Tenaga penggerak Pembangunan Meningkatnya pengetahuan adat melayu bagi masyarakat Terlaksananya pembinaan kelembagaan LPM, dan Ketua RT	367.550.000	0	0
15.	Terlaksananya Program Pemberdayaan-an Masyarakat	- Terlaksananya pembinaan dan koordinasi ke-lurahan ttg inventarisasi sarpras ke-lurahan. - Terbentuknya posyantek dan wartek.	Terlaksananya pengembangan keterampilan bagi masyarakat, TTG, dan Inventarisasi Kelurahan	200.000.000	0	0

**Tabel 6**  
**SKALA KLARIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA TAHUN Per Februari 2020**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Jambi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi Capaian Kinerja ( %)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.	1. Terwujudnya surat masuk dan surat keluar 2. Tersedianya air, telepon, listrik, internet 3. Tersedianya jasa administrasi keuangan 4. Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan perkantoran 5. Tersedianya alat tulis dan barang cetakan 6. Terpenuhinya makanan dan minuman 7. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8. Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 9. Terpenuhinya pembangunan dan perlengkapan gedung kantor	100 100 100 100 100 100 100 100 100	0 14,06 11,44 8,30 0 0 8,49 6,56 98,81
2.	Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur.	1. Tersedianya pakaian dinas 2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 3. Tersedianya perjalanan dinas untuk sekretariat dan bidang lainya	100 100 100	0 0 5,78
3.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Terlaksananya penyusunan: - Rencana Strategis SKPD - Rencana Kerja SKPD 3. Terlaksananya pengembangan data/informasi	100 100 100	99,99 0 0
4.	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Terlaksananya penguatan kelembagaan PUG dan anak	1. Termotivasinya kelurahan dan lokasi binaan 2. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak 3. Penurunan kasus KDRT terhadap anak dan perempuan. 4. Terwujudnya Pembinaan Kesatuan Gerak PKK, KB, Kesehatan, Dasawisma, 10 Pokok Program PKK, LBS, PHBS, UP2K, Kinerja PKK dan	100 100 100 100	0 12,07 0 0

5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	<p>Kader P2WKSS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Penataan Kampung Bersih Aman dan Pintar (Bantar).</li> <li>2. Terwujudnya kegiatan gotong royong bersama masy sekota jambi.</li> <li>3. Tersedianya forum KPM di Kota Jambi, Terlestarikannya adat daerah jambi dan pembinaan adat tk.kec dan kel pilihan pemenang lomba kel tk. Kota jambi. Terbinanya kelembagaan LPM, dan Ketua RT di kel. Serta Termotivasinya kel dan lokasi bnaan di kota jambi.</li> <li>4. Terlaksananya pengembangan keterampilan bagi masyarakat, TTG dan inventarisasi kelurahan</li> </ol>	100 100 100 100	0 0 0 0
----	--------------------------------------	---	--------------------------	------------------

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2020, dapat dilihat pada Daftar Lampiran II : Tabel T-.C.30

## T-.C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA JAMBI**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	TARGET RENSTRAS SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	THN 2021 (n)	THN 2022 (n+1)		
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4		6	7	8					20	
I	1	Penurunan Ratio KDRT			0,025	0,023	0,021	0,020		0,023	0,021	0,020	
	2	Ratio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak			0,0247	0,0237	0,0227	0,0217		0,0237	0,0227	0,0207	
	3	Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif			75%	80%	82%	85%		80%	82%	85%	
II	1	Persentase Kelompok UEM yang Aktif			73%	75%	77%	79%		75%	77%	79%	

	2	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif			63%	65%	66%	67%		65%	66%	67%	
	3	Persentase Pemanfaatan Alat TTG			70%	<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>		<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>	
	4	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir			92%	93%	94%	96%		93%	94%	95%	

## 2.2.4 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel 7**

**SKALA PENGUKURAN ORDINAL KINERJA  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Jambi Tahun 2020**

No.	Skala pengukuran ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 – < 85	Berhasil
3.	55 – < 70	Cukup Berhasil
4.	> 55	Kurang Berhasil

**Tabel. 8**

**KATEGORI SASARAN STRATEGIS  
BERDASARKAN SKALA DAN KLARIFIKASINYA  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Jambi Tahun 2020**

No	Kategori Capaian		Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Persentase
	Skala	Klarifikasi		
1.	< 55	Kurang berhasil	-	-
2.	55-70	Cukup berhasil	-	-
3.	71-85	Berhasil	-	-
4.	86 – 100	Sangat berhasil	-	-

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 9 (sembilan) sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2020 diklasifikasikan mencapai capaian kinerja :

**SANGAT BERHASIL / SANGAT BAIK**

**DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR : 95,20 %**

Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI (DPMPPA)**

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi merupakan tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan Pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, perempuan dan Anak memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran dari Aparatur Pelaksana. Karena itu Sumber Daya Manusia dan pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi akan mengupayakan kemampuan sehingga menjurus kepada keterampilan (skill) sumber daya manusia melalui pengembangan program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai dalam rangka mendukung pencapaian target program Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Isu-isu strategis yang berkembang berkaitan dengan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak setelah diidentifikasi seluruh aspek di dalamnya, Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak telah dilaksanakan serangkaian kajian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak yang mampu menjawab tantangan yang ada serta sejauh mungkin dapat memenuhi tuntutan segenap stakeholders. Namun demikian, masih terdapat permasalahan ataupun



isu yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam melaksanakan visi dan misinya. Adapun isu-isu strategis DPMPPA Kota Jambi sebagai berikut :

1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasannya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
4. Lembaga kelurahan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.
5. Masyarakat terhadap Adat dan Budaya yang harus dilestarikan
6. Masih tingginya jumlah masyarakat kurang mampu.
7. Bertambahnya masyarakat kurang mampu akibat dari pandemic covid-19
8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
9. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
10. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
11. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
12. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di Legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
13. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (Trafficking)
14. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan Kasus Trafficking serta Penanganan Kasus-kasus permasalahan anak.
15. Masih adanya kasus tenaga kerja anak dibawah umur.

16. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam KDRT.
17. Belum adanya unit pelayanan khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **2.4 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD 2021**

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana tersebut pada tabel reviu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2021, sebagaimana tabel T-C. 31 terlampir.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

C	C					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. .)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. .)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		<b>5.011.924.360</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		<b>5.030.195.057</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	74,53	21.679.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	74,53	61.209.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3.642.128.743	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3.642.128.743	

		Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bu-lanan/semester	12 Doku- men			Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bu-lan-an/semeste r	12 Doku- men		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	104.400.000	Administrasi Kepega- waian Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	92.050.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	270.576.615	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Pengel- olaan Ad- ministrasi Umum	100%	305.375.115	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Penye- diaan Jasa Penunjang Uru- san Pemerintah Daerah	100 %	145.671.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Tertib Penye- diaan Jasa Penun- jang Uru- san Pemerinta h Daerah	100 %	150.592.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Penye- diaan Jasa Penunjang Uru- san Pemerintah Daerah	100 %	323.448.400	Penyediaan Jasa Penun- jang Urusan Pemerinta- han Daerah	Jambi	Tertib Penye- diaan Jasa Penun- jang Uru- san Pemerinta h Daerah	100 %	309.429.600	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	501.303.269	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jambi Daerah	Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	471.894.799	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG = 94,10 IDG = 68,11 %	685.255.185	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG = 94,10 IDG = 68,11 %	<b>715.341.993</b>	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	46%	192.548.170	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	46%	192.547.973	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	14 %	485.855.185	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organ-	Jambi	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	14 %	522.794.020	

						isasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Penurunan Rasio KDRT	'0'019	485.107.261	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Penurunan Rasio KDRT	'0'019	65.197.750	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilayani	100 %	357.809.861	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	100 %	160.049.500	
	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jambi	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	10 Kali	127.297.400	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jambi	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Per-	10 Kali	65.197.790	

								empuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Jambi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	30%	<b>168.951.590</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Jambi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	35%	<b>177.149.200</b>	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	78,81%	143.352.090	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	79%	141.983.800	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	78,81%	25.599.500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jambi	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	79%	35.165.400	

						dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jambi	Cakupan Data Gender dan Anak	20%	<b>282.101.733</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jambi	Cakupan Data Gender dan Anak	25%	<b>282.101.590</b>	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jambi	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	20%		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	25%	282.101.590	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Jambi	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80 %	<b>305.283.114</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Jambi	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90 %	<b>281.451.949</b>	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jambi	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	100%	211.398.083	Pelebagaan PHA pada Lem-		Persentase Cakupan Kota Layak	100%	281.451.949	



			JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)			baga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha	Jambi	Anak JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)			
				200 anak				200 anak			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jambi	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	0,173%	93.885.031		Jambi		0,173%	0	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Jambi	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,0207	<b>571.677.622</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Jambi	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,0197	<b>783.234.984</b>	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jambi	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	3 Kali	109.716.110	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jambi	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	3 Kali	133.524.134	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	100 %	461.961.512	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	100 %	649.710.850	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,</b>	Jambi	Persentase Pemberdayaan Lem-		<b>3.411.703.751</b>	<b>PROGRAM PEM-</b>	Jambi	Persentase Pem-		<b>4.744.445.907</b>	

	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM		baga Kemasyarakan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	70%		BERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM		berdayaan Lembaga Kemasyarakan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	71%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Jambi	Persentase Lembaga Kemasyarakan Aktif	41 %	3.411.703.751	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Jambi	Persentase Lembaga Kemasyarakan Aktif	43 %	4.744.445.907	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan		Persentase Tim Penggerak PKK	90%	1.073.521.950					1.073.521.779	

	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jambi	yang di Bina								
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	11 Kec. 62 Kelurahan	52.619.440					38.073.384	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jambi	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif.	32%	444.611.340					540.761.329	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jambi	Jumlah RT/Lembaga yang ikut Kampung Bantar	1014 RT	2.888.373.600					2.841.740.192	
			Jumlah Monev dan Usulan Sarana dan Prasarana Kelembagaan yang dilaksanakan selama setahun.	62 Kali							
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jambi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemasaran Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Dokumen	67.959.934					67.959.724	
	Fasilitasi Pemerintah Desa da-		Jumlah Doku-		77.064.800					77.059.800	

Renja 2022 | DPMPPA

	lam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		men Kerjasama yang menjalin kemitraan	6 Doku- men							
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				197.182.900					105.329.699	
<b>Total</b>					10.922.004.616					12.239.200.000	

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	74,53	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	100%	
		Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/semester	12 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jambi	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	
2	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG = 94,10 IDG = 68,11 %	

	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	46%	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	14 %	
3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Jambi	Penurunan Rasio KDRT	'0'019	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	100 %	
	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jambi	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	10 Kali	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Jambi	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	30%	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	78,81%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	78,81%	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jambi	Cakupan Data Gender dan Anak	20%	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jambi	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	20%	
6	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Jambi	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80 %	

	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jambi	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	100%	
			JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	200 anak	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jambi	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	0,173%	
7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Jambi	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,0207	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jambi	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	3 Kali	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	Jambi	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	100 %	
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM</b>	Jambi	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	70%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Jambi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	41 %	



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan salah satu organisasi perangkat pemerintah kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Jambi, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat pelayanan, fasilitasi, regulasi dan motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Tabel 3.1**

Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

N O	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Kesetaraan	Meningkatkan Kesetaraan	Indeks Pembangunan	Meningkatkan Kesetaraan	Indeks Pembangunan

	Gender	Gender	Gender (IPG)	Gender	Gender (IPG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak		Meningkatkan Kualitas Kota yang Layak Anak	Persentase Hak Anak Yang Terpenuhi

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Adapun TUJUAN STRATEGIK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat disemua Aspek Pembangunan di Kota Jambi.

Indikator Tujuan: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju kesejahteraan keluarga.

Indikator Tujuan:

- 1) Persentase Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- 2) Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 3) Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai Tujuan Strategi tersebut diatas, maka SASARAN STRATEGIK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 – 2024 dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam 6 (enam) Sasaran Strategik sebagai berikut:

1. Tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  
Indikator sasaran: Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna  
Indikator sasaran: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan dan persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna
3. Tercapainya standar kota layak anak  
Indikator sasaran: Persentase standar Kota layak anak yang terpenuhi
4. Meningkatnya usaha ekonomi perempuan  
Indikator sasaran: Persentase Peningkatan kesejahteraan perempuan
5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan  
Indikator sasaran: Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah.

**Tabel 3.2.1**

Tujuan Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat disemua Aspek Pembangunan di Kota Jambi	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	71 %
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak (Madya)	90%
		Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,10 %
		Persentase Indeks Pembangunan Gender (IDG)	68,11%

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4
1	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	64%
2	Meningkatnya persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	85%
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	
3	Tercapainya Standar KLA	Persentase standar KLA yang terpenuhi	90 %
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan	Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan	79%
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	27 Kasus

Tabel 3.2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3
1	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	64%
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	85%
2	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna	44%
3	Persentase standar KLA yang terpenuhi	100%
4	Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan	79%
5	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	27 Kasus

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI TAHUN 2022.**

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan Misi yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi terjadi di Tahun 2022 dalam bidang perencanaan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang di jabarkan pada program kegiatan Tahun 2022, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program rutin DPMPPA diuraikan dalam kegiatan yang merupakan rencana kerja kegiatan Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan
- 2) Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset
- 4) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 7) Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor
- 8) Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional
- 9) Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor

## **2. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus
- 3) Perjalanan Dinas

## **3. PROGRAM PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan
- 3) Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi

Program DPMPPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 1) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Perlindungan Perempuan
- 3) Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Perlindungan Khusus Anak

### **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada Daftar Lampiran : Tabel T-C.33



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lo-kasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	081								
2	081								
2	081	02.01							
2	081	02.01	01						
2	081	02.01	06						
2	081	02.02							
2	081	02.02	01						

Renja 2022 | DPMPPA

2	08	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Alat Bahan Pendukung Kegiatan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan dan Operator Jumlah Rapat Percepatan Realisasi Anggaran	DPMP-PA	34 Item 5 Orang 41 Orang 6 Kali	385.677.840	APBD		34 Item 5 Orang 41 Orang 6 Kali	424.245.624
2	08	01	02.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	DPMP-PA	12 Dokumen	10.999.670	APBD		12 Dokumen	12.099.637
2	08	01	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	DPMP-PA		<b>92.050.000</b>	APBD			101.255.000
2	08	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 92 stel	Jumlah Pengadaan Pakaian	DPMP-PA	92 Stel	77.550.000	APBD			85.305.000
2	08	01	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMP-PA	32 Kali	14.500.000	APBD			15.950.000
2	08	01	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>302.875.115</b>	APBD			<b>333.162.627</b>
2	08	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMP-PA	18 Item	12.001.000	APBD		18 Item	13.201.100
2	08	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMP-PA	15 item 11 Item 3 Orang dan 42Item	126.173.020	APBD			138.790.322
2	08	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	DPMP-PA	5 jenis cetak 24144 lembar	18.217.595	APBD			20.039.355

Renja 2022 | DPMPPA

2	08	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	DPMP-PA	3 Dus, 449 Kue Kotak, 450 Nasi kotak	20.415.000	APBD			22.456.500
2	08	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	DPMP-PA	52 Kali	126.068.500	APBD			138.675.350
2	08	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPMP-PA	100%	<b>150.592.200</b>	APBD		100%	<b>165.651.420</b>
2	08	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMP-PA	10 Item	150.592.200	APBD		12 Item	165.651.420
2	08	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPMP-PA	100%	<b>309.429.600</b>	APBD		100%	<b>340.372.560</b>
2	08	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	DPMP-PA	1704 Surat	44.429.600	APBD		1784 surat	48.872.560
						Jumlah Tenaga TKK	DPMP-PA	3 Orang		APBD		3 orng	-
2	08	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (Air)	DPMP-PA	1 Tahun	265.000.000	APBD		1 Tahun	291.500.000
						Jumlah Jasa Komunikasi (Internet)	DPMP-PA	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
						Jumlah Jasa Komunikasi (Listrik)	DPMP-PA	1 Tahun		APBD		1 Tahun	
2	08	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		DPMP-PA		<b>471.894.799</b>	APBD			<b>519.084.279</b>

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan	DPMP-PA	21 Unit	267.744.800	APBD		21 Unit	294.519.280
2	08	01	02.09	01	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jabatan	DPMP-PA	21 Unit	APBD			21 Unit		
					Jumlah Rehabilitas Ringan/sedang/berat kendaraan jabatan	DPMP-PA	21 unit	APBD			21 unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DPMP-PA	5 Unit	110.754.799	APBD		5 Unit	121.830.279
2	08	01	02.09	02	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	DPMP-PA	5 Unit	APBD			5 Unit		
					Jumlah rehabilitas Ringan/sedang/berat kendaraan dinas/oprasional	DPMP-PA	5 unit	APBD			5 unit		
2	08	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan Peralatan Kerja	DPMP-PA	40 Unit	93.395.200	APBD		40 Unit	102.734.720
2	08	02			<b>ROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	Persentase Penigkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP-PA	IPG=94.10% IDG =68,11 %	<b>715.341.993</b>	APBD		IPG=94.10% IDG =68,11 %	1.573.752.601
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	<b>Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG</b>	DPMP-PA	40%	192.547.973	APBD		50%	211.802.770

Renja 2022 | DPMPPA

2	0	0	2.01	0	Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota.	Jumlah OPD yang telah tersosialisasi Kegiatan PUG dan PPRG	DPMP-PA	35 OPD	192.548.170	APBD		39 OPD	211.802.987
2	0	0	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	DPMP-PA	13,51%	522.794.020	APBD		16,21%	575.073.422
2	0	0	2.02	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang mengikuti Sosialisasi	DPMP-PA	37 Organisasi Perempuan	522.794.020	APBD	13,51	37 Organisasi Perempuan	575.073.422
2	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Penurunan Rasio KDRT	DPMP-PA	0,019%	<b>225.247.250</b>	APBD	0,017%		<b>247.771.975</b>
2	0	0	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	DPMP-PA	8 Kali	65.197.750	APBD		10 Kali	71.717.525
2	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi selama satu Tahun	DPMP-PA	5 Kali	65.216.600	APBD		5 Kali	71.738.260

					Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan		5 Kegiatan				5 Kegiatan	
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	DPMP-PA	100%	160.049.500	APBD		100%	176.054.450
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani	DPMP-PA	46 Kasus	160.049.500	APBD		47 Kasus	176.054.450
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga		35%	<b>177.149.200</b>	APBD		40%	194.864.120
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	DPMP-PA	79%	141.983.800	APBD		80%	156.182.180
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	DPMP-PA	3%	35.165.400	APBD		3,20%	38.681.940
2	08	04	02.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUSPA)	DPMP-PA	16%	35.165.400	APBD		16%	38.681.940

2	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER</b>	<b>Cakupan Data Gender dan Anak</b>	DPMP-PA	25%	<b>282.101.567</b>	APBD		30%	310.311.724
2	0	0	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	DPMP-PA	25%	282.101.567	APBD		30%	310.311.724
2	0	0	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kab/Kota (Rencana Aksi Daerah (RAD) Anak dan Gender, Gender Budget Sistim (GBS) Gender Analysis Pathway (GAP) dan Data Kesetaraan Profil Gender dan Anak)	DPMP-PA	3 Dokumen	153.084.337	APBD		4 Dokumen	168.392.771
2	0	0	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Data yang disajikan dan dimanfaatkan dalam Kelembagaan Data	DPMP-PA	3 Dokumen	129.017.230	APBD		4 Dokumen	141.918.953
2	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMP-PA		<b>281.451.949</b>	APBD			309.597.144
2	0	0	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha/Media yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak	DPMP-PA	7 kali	281.451.949	APBD		7 kali	309.597.144

2	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase Layanan Kasus Kekerasan Anak di UPTD-PA	DPMP-PA	0.0207	<b>783.234.984</b>	APBD		0.0207	861.558.482
2	0	0	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak	DPMP-PA	11 Kali	133.524.134	APBD		11 Kali	146.876.547
2	0	0	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	DPMP-PA	6 Kali	101.265.084	APBD		6 Kali	111.391.592
2	0	0	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak selama setahun	DPMP-PA	5 kali	32.259.050	DAK		5 kali	35.484.955
2	0	0	2.02		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordianasi Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	DPMP-PA	100%	649.710.850			100%	714.681.935
2	0	0	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	DPMP-PA	46 Kasus	151.331.550			47Kasus	166.464.705
2	0	0	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan selama 1 Tahun	DPMP-PA	21 kali	498.379.300	DAK		22kali	548.217.230



2	1 3	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.</b>	DPMP-PA	<b>71%</b>	<b>4.744.445.907</b>	APBD		<b>73%</b>	5.218.890.498
2	1 3	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	DPMP-PA	43%	4.744.445.907	APBD		45%	5.218.890.498
2	1 3	5	2.01	0 1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Buku Hukum Adat Sekota Jambi	DPMP-PA	150 Eks buku 2Judul	38.073.384	APBD		250 Eks Buku 3 Judul	41.880.722
2	1 3	5	2.01	0 2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Tim Penggerak PKK yang di Bina	DPMP-PA		1.073.521.779	APBD			1.180.873.957
2	1 3	5	02.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif.	DPMP-PA	32%	540.761.329	APBD		34%	594.837.462

2	1 3	5	2.01	0 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah RT/Lembaga yang ikut Kampung Bantar	DPMP-PA	1015 RT	2.841.740.192	APBD	1215 RT	3.125.914.211
					Jumlah Monev dan Usulan Sarana dan Prasarana Kelembagaan yang dilaksanakan selama setahun.	DPMP-PA	62 Kali	62 Kali				
2	1 3	5	02.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat (UP2K) Kota Jambi	DPMP-PA	33%	67.959.724	APBD	66%	74.755.696
2	1 3	5	02.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMP-PA	2 Kegiatan	77.059.800	APBD	2 Kegiatan	84.765.780
						Jumlah Dokumen Kerjasama yang menjalin kemitraan		2 Dokumen			3 Dokumen	
2	1 3	5	02.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat	Persentase Kader Kelembagaan yang Aktif	DPMP-PA	32%	105.329.699	APBD	34%	115.862.669
									<b>7.208.972.850</b>			
									<b>12.239.200.000</b>			

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan menguraikan dalam 5 (lima) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 12.239.200.000** (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Jambi, Program Non urusan merupakan kegiatan rutin terdiri dari 1(satu) program 7 (Tujuh) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub. Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD.
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
    - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
    - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Program Urusan Wajib :

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
    - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2. Program Perlindungan Perempuan
    - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
    - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
    - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
    - a. Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  6. Program Perlindungan Khusus Anak
    - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
    - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.

## Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<p>1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>-</li> </ul>
2	Meningkatnya persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	<p>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</li> </ul>

3	Tercapainya Standar KLA	<p>3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</p> <p>a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan	<p>4. PROGRAM PENGARUSUTMAAN GENDER DAN PEMBERERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi</li> </ul>
5	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	<p>5. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</li> </ul>

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi**  
**Tahun 2022**

No.	Bagian	Urusan			Non Urusan			Urusan dan Non Urusan		
		Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	7	12	7.209.004.943	1	7	5.030.195.057	8	19	12.289.200.000



## BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai penjabaran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, Juli 2021

**Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA JAMBI,**



**drg. IRAWATI SUKANDAR, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640413 199302 2 001